

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku, Jurnal, dan Sumber Lainnya

- Anartany, S. M., & Suseno, D. A. (2018). Strategi Optimalisasi Aset Idle Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Economics Development Analysis Journal*, 7(1), 32–38.
- Antoh, A. E. (2017). Pengaruh Manajemen Aset Dalam Optimalisasi Aset Tetap Tanah ( Studi di Kabupaten Paniai ). *Manajemen & Bisnis*, 1, 37–47.
- Anwar, F. (2018). Analisis Model Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Di Aceh. *Jurnal Manajemen Dan Inovasi*, 9(2), 1–12.
- BPKPD Kabupaten Kebumen. (2022). Visi dan Misi. Diakses dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen: <https://bpkpd.kebumenkab.go.id/index.php/web/post/2/visi-dan-misi>
- Dermawan, A. (2019). Dari Lorong-lorong Istana Presiden. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Garini, Y., & Wahyuningrum, H. (2018). Kajian Kebijakan Strategis dalam Pengelolaan Iradiator pada Era PP Tarif Baru. *Prosiding Seminar Nasional APISORA 2018*, 229–235.
- Hindarto, T. (2020). *Bukan Kota Tanpa Masa Lalu: Dinamika Sosial Ekonomi Kebumen Era Arung Binang VII* (A. Y. Wati, D. Novidiantoko, & A. Rasyadany (eds.); Pertama). Deepublish.
- Karianga, H. (2013). *POLITIK HUKUM DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH* (Suwito (ed.); Pertama). Kencana. <https://doi.org/www.prenadamedia.com>
- Karianga, H. (2017). *CARUT MARUT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH Perspektif Hukum dan Politik* (E. Wahyudin (ed.); Pertama). Kencana. <https://doi.org/www.prenadamedia.com>
- Khusaini, M. (2018). *Keuangan Daerah* (T. UB Press (ed.)). UB Press. <https://doi.org/http://www.ubpress.ub.ac.id>
- Maulidiah, S. (2017). Optimalisasi Pengelolaan Aset Sebagai Wujud Reformasi Birokrasi Di Daerah. *Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 3(1), 233–242.

- Moleong, L. J., & Edisi, P. R. R. B. (2004). *Metodelogi penelitian*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Nasution, D. A. D. (2018). Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2, 153.
- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Purba, R. B., & Aziza, N. (2019). Pengelolaan Aset Tetap Daerah Dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan Aset Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(2), 152–164.
- Putri, S. L. (2016). *Perancangan Business Continuity Plan Untuk Teknologi Informasi Pada Studi Kasus STIE Perbanas*. 256.
- Rachmawati, I. N. (2007). PENGUMPULAN DATA DALAM PENELITIAN KUALITATIF : *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35–40.
- Runiawati, N. (2017). Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Suatu pendekatan teoritis dan praktis dalam menentukan metode pemanfaatan aset). *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 1(1), 45. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v1i1.13553>
- RSUD dr. Soedirman Kebumen. (2018, Juni 15). Retrieved from <https://rsuddrsoedirman.kebumenkab.go.id/>
- Salam, M. S. N. (2014). ASPEK HUKUM PERJANJIAN PAKAI ATAS BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH. *Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2(6), 44.
- Santoso, F. R., & Nurbiyanto. (2021). Analisis Highest and Best Use atas Aset Tetap Milik Pemerintah Kota Batam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 199–208. <https://doi.org/10.33087/eksis.v12i2.267>
- Siregar, S. S. (2019). TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN DALAM PERJANJIAN PINJAM PAKAI ASET MILIK DAERAH BERKAITAN DENGAN PERISTIWA FORCE MAJEURE. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 1(3), 82–91.
- Sofyan, A. T., Hidayat, R., & Suryaningsih, E. (2021). ANALISIS PEMANFAATAN SEWA BARANG MILIK DAERAH (BMD) TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2017-2019. *Syntax Idea*, 3(4), 6.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Tumarar, D. I., Pangemanan, S., & Mawikere, L. (2016). Analisis Penggunaan, Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah di Pemerintahan Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(4).

Wicaksono, K. (2012). Problematika dan Tantangan Desentralisasi di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 94, 21–28. <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.21-28>

Wijaksono, R. T. (2017). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SEWA BARANG MILIK NEGARA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH. *E-Journal Lentera Hukum*, 4(2), 131. <https://doi.org/10.19184/ejrh.v4i2.4782>

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Buku III.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jakarta.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.

Pemerintah Kabupaten Kebumen. 2017. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kebumen.

Pemerintah Kabupaten Kebumen. 2020. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebumen.

Pemerintah Republik Indonesia. 1945. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 2003. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 2015. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 2019. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 2020. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Jakarta.